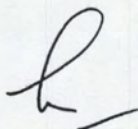


PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Badrul Anam ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 26 Juli 2010
Pembimbing,



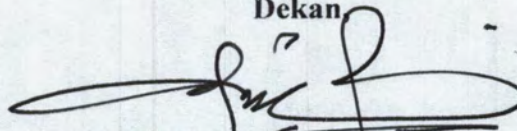
DR. Biyanto, M.Ag.
NIP. 197210101996031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Badrul Anam ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 10 Agustus 2010

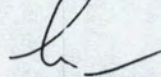
Mengesahkan,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin
Dekan



Dr. Ma'sum Nurajim, M.Ag.

NIP. 196009141989031001

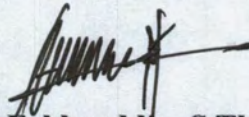
Ketua,



DR. Bivanto, M.Ag.

NIP. 197210101996031001

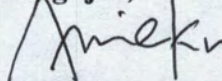
Sekretaris,



M. Anas Fakhruddin, S.Th. M.Si

NIP. 198202102009011007

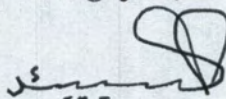
Penguji I,



Dra. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001

Penguji II,



Andi Suwarko, M.Si

NIP. 197411102003121004

ABSTRAKSI

Judul Skripsi : Makna Kepemimpinan Politik Kyai Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.
Pembimbing : DR. Biyanto, M.Ag.
Penulis : Badrul Anam

Key word: Politik Kyai, Kepemimpinan.

Bagi penduduk desa, pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan sebuah arena demokrasi paling nyata. Dalam proses pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat yang jauh lebih besar karena pemilihannya diselenggarakan secara langsung dengan sistem *One Man One Vote*.

Kyai, sebagai sebutan kehormatan bagi elit agama khususnya di Jawa, masih sering diperdebatkan; lebih-lebih jika dikaitkan dengan politik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat, terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan kyai meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian dari kehidupan agama itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan; 1) Tanggapan masyarakat terhadap kepemimpinan kyai di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. 2) Tanggapan masyarakat terhadap keterlibatan kyai dalam pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu data yang di peroleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kyai di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Kepatuhan masyarakat terhadap kyai yang ada di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto nampak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang dianggap memiliki kelebihan dari orang lain, para kyai sering dimintai saran atau pendapat dalam persoalan-persoalan yang kerap kali muncul dalam wacana kehidupan sehari-hari. Kekuatan kepemimpinan kyai di Desa Tunggalpager yang didukung dengan kharisma akan membuat masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi penduduk desa, pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan sebuah arena demokrasi paling nyata. Dalam proses pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat yang jauh lebih besar karena pemilihannya diselenggarakan secara langsung dengan sistem *One Man One Vote*.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebutkan secara konstitusional Pilkades dirancang pemerintah dengan prinsip yang sangat demokratis. pemilihan dilaksanakan secara langsung, jujur dan adil serta melibatkan masyarakat secara penuh.¹

Bagi warga desa, pilkades benar-benar ingin dijadikan sebagai momentum untuk memilih seorang pemimpin yang dinilai mampu membawa kemajuan desa melalui proses pemilihan yang benar-benar demokratis, jujur, dan adil.

Tetapi di banyak desa, pilkades yang demokratis itu tak urung harus dibayar dengan harga yang tinggi. Kemenangan seorang kandidat kades yang sangat ditentukan oleh dukungan suara individu mengakibatkan polarisasi dibasis-basis komunal. Jadilah, pergolakan politik tidak hanya melibatkan aktor-aktor kandidat

¹ Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Pasal 95 ayat 2 dan 3

pondok pesantren yang masih eksis sampai saat ini. Pada pilkades yang lalu, salah satu putra pengasuh pesantren “Nahrul Ulum” Wonogiri ikut mencalonkan menjadi kepala desa.

Keikutsertaannya dalam pilkades membuat 2 calon lainnya mengundurkan diri meskipun sudah mengeluarkan biaya cukup banyak. Sebab tradisi masyarakat di Tunggalpager atau desa-desa di sekitarnya, siapapun yang mencalonkan menjadi kepala desa berarti sudah siap membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Biasanya 2 – 3 bulan menjelang pemilihan kepala desa, para calon membuka pintu rumahnya untuk para pendukungnya dengan berbagi macam jamuan. Dari segi finansial, para calon sudah mengeluarkan biaya tidak sedikit, belum lagi biaya operasional bagi team suksesnya. Demikian pula sewaktu para calon berkeliling untuk sosialisasi, para calon harus siap-siap mengeluarkan biaya manakala menjumpai para pemilih yang kebetulan berada di warung-warung kopi atau lainnya.

Semua ini membuktikan bahwa masih ada aspek-aspek menarik yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut. Kajian ini mencoba untuk memahami makna politik kyai dalam pilihan kepala desa sebagai salah satu bentuk demokrasi pada masyarakat pedesaan yang secara langsung bersinggungan dengan eksistensi kyai ditengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Makna Kepemimpinan Politik Kyai Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

2. Abdurrahman Wahid dalam bukunya *Bunga Rampai Pesantren* CV. Dharma Bhakti Jakarta menyebutkan bahwa kyai memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat menuju pengembangan yang lebih baik. Kyai tidaklah berkeinginan meredam akibat perubahan yang terjadi, tetapi justru memelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri. Ia bukan melakukan penyaringan informasi, tetapi menawarkan agenda perubahan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ia sepenuhnya berperan dalam proses perubahan sosial, justru karena ia *mafhum* bahwa perubahan tersebut merupakan *sunnatullah* yang tak terelakkan lagi.
3. Endang Turmudi dalam bukunya *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, 2004, menyebutkan bahawa keberhasilan kiai dalam peran-peran kepemimpinan menjadikan kiai semakin kelihatan sebagai orang yang berpengaruh yang dapat dengan mudah menggerakkan aksi sosial. Oleh karena itu, kiai telah lama menjadi elite yang kuat. Ada dua faktor yang mendukung posisi kuat seorang kiai, yaitu:
 - a. Kiai adalah orang yang berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian dan pengetahuannya yang luas tentang Islam menyebabkan kiai selalu punya pengikut, baik pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya.
 - b. Kiai biasanya berasal dari keluarga berada. Meskipun tidak sedikit kiai yang miskin pada saat ia mulai mengajarkan Islam di tunjukan oleh ukuran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pilkades

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat **Pilkades**, adalah adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.¹

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Disisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan *transfer* kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu *moment* dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

¹ www.Wikipedia.com

3. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
4. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
5. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
6. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
7. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
8. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

memungkinkan segala kebijakan yang diambil tidak berbenturan satu sama lainnya. Berkaitan dengan penentuan policy pendidikan, lebih-lebih menyangkut aspek managerial, pihak lain hanyalah sebagai pelengkap. Kalaupun ada ustadz dan pengurus yang mengurus roda pendidikan, itu sebatas berada di bawah skenario konsep yang telah ditentukan oleh kyai. Dalam pesantren, kyai adalah pemimpin tunggal yang memegang wewenang hampir mutlak.

Dibandingkan dengan elite lokal yang lain seperti para petani kaya, kyai yang memimpin pesantren punya posisi yang lebih terhormat. Hal ini telah menjadikan kyai sebagai pemimpin dalam masyarakat dan kepemimpinannya tidak hanya pada wilayah agama tetapi meluas pada wilayah politik. Keberhasilan kyai dalam peran-peran kepemimpinan menjadikan kyai semakin kelihatan sebagai orang yang berpengaruh yang dapat dengan mudah menggerakkan aksi sosial. Oleh karena itu, kyai telah lama menjadi elite yang kuat. Ada dua faktor yang mendukung posisi kuat seorang kyai, yaitu:

- a. Kyai adalah orang yang berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian dan pengetahuannya yang luas tentang Islam menyebabkan kyai selalu punya pengikut, baik pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya.

Pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil efektif maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik.

Kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tidak berupa kekerasan (*non violence*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang tidak wajar (*non konvensional*) dan berupa kekerasan (*violence*), seperti

Posisi kyai telah memainkan peran perantara bagi umat Islam dengan memberi mereka pemahaman apa yang terjadi di tingkat nasional. Para penduduk desa yang biasa menyebut diri mereka orang awam, sadar bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di tingkat nasional. Hubungan yang dekat antara penduduk desa tersebut dengan kyai menempatkan kyai pada posisi sebagai penerjemah yang memberikan penjelasan dalam konteks agama dan mengklarifikasi berbagai masalah bangsa pada umumnya. Posisi menonjol para kyai ini lebih tampak ketika partai politik secara intens memasuki masyarakat Jawa. Ini terjadi karena kyai sendiri adalah bagian dari elite politik, suatu posisi yang strategis dan diklaim mempunyai posisi kekuasaan yang sah untuk mempersatukan umat dalam berbagai macam tantangan yang nyata dari kelompok-kelompok lain.

Sejak masa-masa awal kerajaan Islam, tampak para ulama memainkan peranan penting dalam pemerintahan. Menurut Benda yang dikutip Dirdjosanjoto, para penguasa yang baru dinobatkan harus banyak bersandar kepada para ulama, guru mistik dan ahli kitab, karena merekalah yang dapat menobatkan para penguasa tersebut menjadi pangeran-pangeran Islam, mengajar dan memimpin upacara keagamaan, serta menjalankan hukum Islam terutama di bidang perkawinan, perceraian, serta warisan. Di bawah kesultanan Islam, karena sultan diakui sebagai

Akan tetapi peranan yang dimainkan oleh kyai dalam kedudukan sebagai elit sosial-keagamaan masyarakat selain sebagai pewaris tradisi keagamaan juga pemberi arah atau tujuan kehidupan masyarakat yang mesti ditempuh memiliki nilai yang signifikan. Karena itu, ia lebih bersifat memberikan penyerahan terhadap masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi, peran-peran seperti itu sangat diperlukan, apalagi bagi masyarakat yang masih bersifat agraris.

Apalagi peran yang dimainkan oleh para kyai yang berada di pedesaan. Biasanya, mereka adalah guru agama, guru ngaji yang memiliki surau/langgar/musala, pengurus takmir masjid, dan pesantren yang kecil. Kelebihan kyai-kyai yang ada di pedesaan dengan kyai-kyai besar itu adalah keterlibatan mereka secara aktif dalam masyarakat. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada jarak fisik maupun psikis. Kyai-kyai besar dan pesantrennya saat ini menjadi komunitas tersendiri yang memiliki jarak dengan masyarakat luas.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Letak, Luas, Batas-batas dan Pembagian Wilayah

1. Letak Desa Tunggalpager

Secara administratif Desa Tunggalpager termasuk dalam wilayah kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto. Letak Desa Tunggalpager ada di bagian timur kabupaten Mojokerto.

2. Luas Desa Tunggalpager

Menurut data monografis statis Desa Tunggalpager tahun 2010, luas Desa Tunggalpager secara keseluruhan kurang lebih 5.662 km².

3. Batas batas Desa Tunggalpager

Secara administratif Desa Tunggalpager termasuk dalam wilayah kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Jabotegal.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pungging.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Lebaksono.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Mojosari.

4. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Tunggalpager terdiri atas 7 dusun yang masing-masing dipimpin oleh satu kepala dusun. Pembagian dusun yang dijadikan lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkades Di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) menjadi ikon baru dalam isu strategis integrasi sosial dan manajemen konflik pada parameter pelembagaan politik. Ada dua pendekatan yang dilakukan daerah dalam mengoptimalkan fungsi pilkades sebagai wahana demokratisasi di tingkat lokal. *Pertama*, daerah menerapkan model pilkades serentak. Dengan model itu, pelaksanaan pilkades diharapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai media pembelajaran demokrasi di tingkat desa. Cara tersebut diharapkan dapat meminimalkan eksese negatif yang menodai pelaksanaan pilkades, seperti praktik politik uang yang sering berkaitan dengan jaringan perjudian. Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa praktik negatif semacam itu tidak sepenuhnya dapat dihapuskan. *Kedua*, daerah menekankan pada kualitas penyelenggaraan pilkades. Sebagaimana diketahui bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan wajah demokrasi yang sebenarnya. Jauh lebih baik dari Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, karena pemilih benar-benar dapat memberikan pilihannya terhadap calon yang telah dikenal.

Tidak seperti pemilu legislatif, yang seringkali calon dengan perolehan suara terbanyak, harus mengalah terhadap nomor urut satu. Rakyat justeru disuguhi gambaran individu setiap tokoh yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka dapat menentukan pilihannya didasarkan pada pengenalan, pengetahuan dan pemahaman akan calon Kades yang bakal dipilihnya, dengan pemenang adalah pemimpin yang paling banyak dipilih warga.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa Tunggalager dilaksanakan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang berkembang dan untuk mencapai tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan, dan mewujudkan Desa yang mandiri.

Proses Pilkades ini juga menjadi wahana perpolitikan warga yang akan menentukan maju mundurnya desa Tunggalager di masa depan. Ini artinya calon yang terpilih memiliki rasa tanggung jawab langsung kepada warganya. Kesalahan yang dilakukan oleh calon terpilih akan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat sekitar.

Disisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu *moment* dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan

penguasaan agamanya yang luas atau kepribadiannya yang baik dimata masyarakat. Sehingga dengan kharismanya, kyai bisa menjalankan fungsinya tersebut dengan baik.

Menurut beberapa responden seorang kyai wajib di hormati karena beberapa alasan yaitu:

- a. Kyai adalah orang yang dituakan dalam masyarakat sehingga masyarakat menganggap kyai seperti orang tua sendiri. Hal ini tergambar dari pengakuan bapak Sunarto sewaktu mengundurkan diri dari bursa pencalonan kepala desa.
- b. Kyai memiliki banyak ilmu agama yang tinggi dan setiap orang tidak bisa memilikinya. Kedalaman ilmu agama yang dimiliki para kyai tidak hanya pada tataran teoritis, melainkan juga diimplementasikan dalam tingkah laku konkrit dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Saran atau petuah yang disampaikan kyai sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Saran-saran yang disampaikan kepada masyarakat atau individu yang kebetulan sowan ke rumah kyai membawa kesejukan dan ketenangan jiwa, sehingga dalam menghadapi masalah akan berpikir jernih. Tidak gegabah mengambil keputusan yang berujung pada penyesalan.
- d. Kyai memiliki kharisma yang biasanya di peroleh dari keturunan ataupun kelebihan yang di berikan dari Tuhan YME. Kharisma ini akan terpancar pada kepribadian dan tingkah lakunya yang selalu menjadi suri tauladan santri dan masyarakat sekitarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa data penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna kepemimpinan Kyai di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto adalah bahwa kyai wajib dipatuhi. Kepatuhan masyarakat terhadap kyai yang ada di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto nampak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang dianggap memiliki kelebihan dari orang lain, para kyai sering dimintai saran atau pendapat dalam persoalan-persoalan yang kerap kali muncul dalam wacana kehidupan sehari-hari. Kekuatan kepemimpinan kyai di Desa Tunggalpager yang didukung dengan kharisma akan membuat masyarakat semakin patuh. Kharisma yang dimilikinya akan membuat warga sekitar merasa segan untuk menolak ajakan atau himbauan. Mereka menganggap para kyai memiliki kelebihan akan hal-hal ghoib yang masih kental dalam pola pikir mereka.

Ada beberapa alasan mengapa seorang kyai wajib di hormati yaitu:

- a. Kyai adalah orang yang dituakan dalam masyarakat sehingga masyarakat menganggap kyai seperi orang tua sendiri.

- b. Kyai memiliki banyak ilmu agama yang tinggi dan setiap orang tidak bisa memilikinya.
 - c. Saran atau petuah yang disampaikan kyai sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.
 - d. Kyai memiliki kharisma yang biasanya di peroleh dari keturunan ataupun kelebihan yang di berikan dari Tuhan YME.
2. Keterlibatan kyai dalam pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Dari berbagai responden ada beberapa kegiatan yang mengindikasikan keterlibatan kyai dalam Pilkades di desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2007. Bentuk-bentuk keterlibatannya adalah sebagai berikut:

- a. Merestui pencalonan seorang calon
- b. Ceramah-ceramah keagamaan atau pengajian
- c. Memberikan Anjuran kepada masyarakat untuk aktif mencari dukungan terhadap calon kepala desa.

Sedangkan tanggapan masyarakat desa Tunggalpager terhadap keterlibatan kyai dalam pilkades dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis yaitu pilkades
- b. Sebagian warga membiarkan keterlibatan kyai dalam pilkades

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muiz Ruslan, Ustman, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Almond Gabriel A. dan Sidney verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Alih Bahasa Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Angkasa, 1990.
- Bruinessen, Martin van. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Yogyakarta: Bentang Budaya. 1998.
- Budiarjo, Miriam *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai)*. Jakarta: LP3ES. 1994.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Cetakan Pertama (1). 1999
- Faridl, Miftah, *Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia, Jurnal Sositologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007*.
- Geertz. Clifford *Abangan, santri, Proyayi dalam Masyarakat Jawa* (Terjemahan oleh Aswab Mahasin). Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Haricahyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Hadi, Krishno dkk, *Perilaku Partai Politik*, Malang: UPT UMM Press, 2006.
- [http://mbangun-desa.blogspot.com/2010/02/pilkades sarana mewujudkan demokrasai.html](http://mbangun-desa.blogspot.com/2010/02/pilkades%20sarana%20mewujudkan%20demokrasai.html)
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Alih bahasa Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

